

INTISARI

ANALISIS PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM BAGI PENGUPAHAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS PADA PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh

Omar Muhammad¹ dan Ari Hernawan²

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisis terperhatikan tidaknya aspek kemanfaatan hukum bagi penyandang disabilitas dalam peraturan yang terkait dengan pengupahan. (2) Mengetahui dan menganalisis penerapan asas kemanfaatan hukum bagi penyandang disabilitas dalam praktek terkait pengupahan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif-empiris dengan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, Peraturan ketenagakerjaan terkait pengupahan terutama di tingkat Perda, dalam penelitian ini Perda DKI Jakarta, belum sepenuhnya memperhatikan aspek kemanfaatan hukum bagi penyandang disabilitas, Perda DKI 10 tahun 2011, sekedar melindungi namun tidak menyebutkan secara eksplisit bagaimana melindungi disabilitas secara spesifik harusnya Perda mengatur lebih detail sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Asas Kemanfaatan hukum bagi penyandang disabilitas terkait Pengupahan dalam Praktek belum sepenuhnya diterapkan dalam Praktek, dalam penelitian, masih ditemukan Upah Penyandang disabilitas yang masih dibawah Upah minimum dan diberikan namun dipotong untuk ditabung, dan dinas DKI tidak mewajibkan untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas dikarenakan tidak adanya sanksi, meskipun ada upaya dari BPJS ketenagakerjaan untuk melakukan hal tersebut, namun tetap saja bukan dari pihak pemerintah, Pengawasan pengupahan dari pemerintah juga sangat kurang.

Kata Kunci : Disabilitas, Kemanfaatan Hukum, Upah

¹ Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF LEGAL UTILIZATION OF LEGAL LAWS FOR LABOR WITH DISABILITIES ON DISBURSEMENT IN INDONESIA

By

Omar Muhammad³ and Ari Hernawan⁴

This study aims to (1) Know and analyze whether or not the aspects of legal benefit for persons with disabilities in the regulations related to wages. (2) To know and analyze the application of the principle of legal benefit for PwDs in wage-related practices.

This research is juridical normative-empirical with primary data and secondary data as data source. Data were examined by interview and document study. Data were analyzed qualitatively and the results of the analysis were presented descriptively.

The results of the study indicate that employment regulation related to wages, in this study, Jakarta Regional Regulation of Jakarta, has not fully paid attention to the legal benefit aspect for people with dissatisfaction, Perda DKI 10 year 2011, just protecting but not explicitly explaining how to protect the specific disability should regulation organize more detail in accordance with the needs of the region. The principle of law utilization as a person with disability related Pengupahalam Practn not yet fully applied in Practice, in research, still found Wages of Displaced Persons who are still below the minimum wage and given but cut for savings, and DKI Jakarta does not require to memepkerajakn labor disability due to the absence of sanctions, despite the efforts of BPJS employment to do so, the name is not even from the government side, the wage payers from the government are too bad

Keywords: Disability, Legal Benefits, Wage

³ Students of Law Masterof University of Gadjah Mada

⁴ Lecturer of Faculty of Law University of Gadjah Mada